

**IMPLEMENTASI MODEL CENTER FOR THE STUDY OF  
EVALUATION-UNIVERSITY OF CALIFORNIA IN LOS ANGELES  
(CSE-UCLA): DALAM MENGEVALUASI PROGRAM  
*e-PLANNING* DAN *e-BUDGETING***

**Ika Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Arisona Ahmad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Sektor Publik  
Politeknik Negeri Jember  
Surel<sup>1</sup>: ikaswhyn922@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of e-Planning and e-Budgeting using the CSE-UCLA evaluation model. The method used in this research is a qualitative evaluative method approach. The results of this research show that the evaluation assessment using CSE-UCLA which contains the evaluation components of System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, and Program Certification in the application of e-Planning and e-Budgeting is said to be good and optimal.*

**Keywords:** *e-Planning, e-Budgeting, CSE-UCLA*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode evaluatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian evaluasi menggunakan CSE-UCLA yang memuat komponen evaluasi *System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, and Program Certification* pada penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dikatakan baik dan optimal.

**Kata kunci:** *e-Planning, e-Budgeting, CSE-UCLA*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan dikatakan baik apabila telah menerapkan asas *good governance*. Penerapan *good governance* diperlukan adanya keselarasan antara tiga faktor utama yaitu pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil (Handayani & Nur, 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan *World Bank, Good Governance* dijelaskan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan akuntabel.

*Good Governance* adalah suatu bentuk tatanan yang digunakan negara dengan sistem akuntabel dan transparansi informasi publik yang baik. Negara membutuhkan suatu bentuk kebijakan yang khusus dalam sistem kelembagaan dan tata laksana pemanfaatan atau ICT (*Information Communication and Technology*) dengan tujuan efektif dan efisien seperti *Massive Open Online Courses* (MOOC) yang sudah banyak dikembangkan berbagai negara (Rafiqi *et al.*, 2020). Maka, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*.

Salah satu sistem informasi manajemen yang digunakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Aplikasi SIMDA maupun SIPD memuat siklus pemerintah daerah yang dimulai dari perencanaan publik, penganggaran publik, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban publik. Perencanaan dan penganggaran yang telah terintegrasi dengan teknologi disebut sebagai perencanaan dan penganggaran elektronik atau *e-Planning* dan *e-Budgeting*.

*e-Planning* merupakan fitur yang terdapat dalam aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk proses kegiatan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel. *e-Budgeting* merupakan fitur yang terdapat dalam aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun anggaran secara elektronik, berdasarkan penggunaannya di bidang pemerintahan nantinya dapat memproteksi pelaksanaan kegiatan penganggaran di Indonesia.

Namun, Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dalam wujud *e-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, pada tahun 2020 mendapatkan suatu rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (DPRD), yang menilai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jember belum mewujudkan pengembangan *e-Government* yang mendukung kinerja pelayanan dan birokrasi.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap layanan *e-Government* melalui *e-Planning* dan *e-Budgeting*, sehingga nantinya diperoleh suatu keputusan sebagai dasar rekomendasi untuk layanan *e-Planning* dan *e-Budgeting* ke arah yang efektif dan optimal, dengan menggunakan model evaluasi *Center for The Study of Evaluation-University of California in Los Angeles* (CSE-UCLA). Maka, dapat diangkat rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan terkait dengan keberhasilan penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan

menggunakan model CSE-UCLA di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di dalam praktek kerja yang sesungguhnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. *Good Governance***

*Good governance* didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang baik. Sementara *World Bank* mengartikan istilah *good governance* sebagai bentuk kegiatan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggung jawab. Selaras dengan prinsip yang dianut demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah salah alokasi dana investasinya, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif dan menjalankan tertib penganggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi berkembangnya suatu aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009).

*United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan istilah *good governance* sebagai “*The exercise of political, economic and administrative power to manage national affairs at all levels.*”, yang artinya sebagai pelaksana pemerintahan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola permasalahan tingkat nasional hingga ke tingkat internasional (KPK, 2016).

UNDP dalam buku Sedarmayanti (2009) mengemukakan sembilan (9) prinsip yang ada teori *good governance*, teori *good governance* merupakan suatu nilai hukum yang menjadi tolak ukur pada pelaksanaan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik untuk tujuan negara dan memberikan perlindungan hukum pada masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik berpedoman pada asas umum, yang terdiri dari partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), berorientasi pada consensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategis (*strategic vision*). Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa menurut UNDP akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum adalah empat komponen atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran tentang karakteristik administrasi publik yang berciri *good governance*.

### **2. *e-Planning***

Menurut Robbins dan Coulter (2002) pada buku Bastian (2010) kegiatan perencanaan secara umum diartikan sebagai bentuk kegiatan perumusan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan kedepan yang lebih baik dari sebelumnya berdasarkan pertimbangan suatu kondisi saat ini, ataupun dimasa lampau. *e-Planning* merupakan suatu kegiatan diawali dari penetapan tujuan pemerintah, yaitu bagaimana bentuk suatu strategi yang tepat dalam mencapai tujuan secara keseluruhan dan perumusan sistem perencanaan. Fungsi *planning* adalah menetapkan beberapa tujuan pemerintah dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

### 3. *e-Budgeting*

Anggaran dapat digambarkan sebagai kumpulan pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi di satu periode mendatang. Perancangan anggaran ini selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi sebelumnya. *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana keuangan yang menampilkan perkiraan biaya yang diusulkan serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam jangka waktu tertentu (Bastian, 2010).

Anggaran publik memiliki fungsi sebagai hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja, sebagai alat untuk mencatat aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang; alat komunikasi internal yang menghubungkan mekanisme kerja vertikal ke berbagai unit kerja; dan alat untuk mendorong tindakan yang efektif dan efisien untuk mencapai visi organisasi dan juga merupakan instrumen publik dan kebijakan fiskal.

### 4. Model CSE-UCLA

*Center for the Study of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA)* merupakan model evaluasi yang memiliki (5) dimensi evaluasi (*system assessment, program planning, program implementation, program improvement, program certification*) yang cocok digunakan untuk mengevaluasi program layanan yang membantu kehidupan manusia, seperti: program perpustakaan, bank, koperasi, *e-Government, e-learning* dan lainnya”, yang dikembangkan oleh Alkin pada 1969, 1991 (Divayana, D.G.H., & Sugiharni, 2016).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menganalisis penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan model evaluasi *Center for The Study of Evaluastion-University of California In Los Angeles (CSE-UCLA)*. Jenis penelitian yang digunakan pada riset ini adalah pendekatan kualitatif dengan ini secara spesifik diarahkan pada evaluatif. Model evaluasi yang digunakan menggunakan analisis evaluasi CSE-UCLA yang dikembangkan oleh Alkin pada tahun 1969-1991. Model ini adalah suatu model evaluasi tentang penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* berdasarkan 5 komponen yang terdiri dari *System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, dan Program Certification*.

Objek penelitian ini merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara umum Daerah (BUD) Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara kepada narasumber. Narasumber meliputi Kepala BPKAD, Bagian Anggaran dan Sub Bagian Anggaran Belanja. Data Sekunder berasal dari dokumen, buku, jurnal, artikel atau sumber yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai *e-Planning* dan *e-Budgeting* dengan menggunakan model CSE-UCLA.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui, pengamatan langsung dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Peneliti hanya terlibat langsung atau berinteraksi langsung dengan objek penelitian namun melakukan pengamatan biasa secara penuh yang berkaitan dengan *e-Planning* dan *e-Budgeting* di BPKAD Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan non-partisipasi. Wawancara pada penelitian ini menggunakan tiga jenis wawancara yaitu wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara dan wawancara baku terbuka.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode evaluatif. Sehingga menggambarkan suatu hasil dari data penelitian dan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah disiapkan, lalu melakukan evaluasi deskriptif menggunakan model evaluasi CSE-UCLA, penyajian data dalam penelitian yang berbentuk narasi atau penjelasan, sehingga ditarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. System Assessment**

#### **1.1 Dasar Hukum Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting***

Landasan hukum merupakan aspek penting yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan patuh terhadap hukum, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Penyelenggaraan *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember tidak terlepas dari undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai suatu dasar hukum atas penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting*.

Aspek dasar hukum dari penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* di BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum pada penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* sesuai dengan penelitian sebelumnya yang berlaku yaitu, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dalam menjalankan *e-Planning* dan *e-Budgeting*, terdapat dasar hukum yang harus dipatuhi hal ini bertujuan untuk mengatur operasi tata kelola data yang dibuat oleh lembaga pusat dan daerah untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (Perpres No 39 tahun 2019).

#### **1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember**

Visi adalah suatu pandangan masa depan tentang organisasi atau lembaga lainnya. Visi berbentuk suatu gagasan yang dibuat secara tertulis tentang cita-cita atau tujuan utama yang akan menjelaskan arah suatu organisasi. Visi akan berdampak besar pada suatu organisasi yang ingin melakukan perubahan. Menurut J.B. Whittaker dalam bukunya "*Strategic Planning and Management*" bahwa visi adalah suatu gambaran masa depan yang akan dipilih dan diwujudkan pada saat tertentu dalam waktu. Sedangkan, misi merupakan proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau badan

atau organisasi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Menurut Wibisono, misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan keberadaan suatu organisasi, yang meliputi hal-hal yang ditawarkan organisasi itu sendiri kepada publik baik berupa produk ataupun jasa.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada penelitian ini, dengan objek penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember yang memiliki visi dan misi seperti, Visi BPKAD adalah “Sudah Waktunya Membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”. Misi yang akan diemban BPKAD dalam mewujudkan visi secara operasional adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”.

### 1.3 Analisis Kebutuhan dari penerapan sistem yang memuat *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Sehubungan dengan semakin tingginya aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu dibangun suatu sistem informasi yang dapat mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif, dengan adanya *Open Government Indonesia* (OGI) dan perubahan pola kerja yang memanfaatkan teknologi informasi, akuntabilitas dan transparansi pemerintah menjadi sangat penting (Dewi *et al.*, 2023). Penerapan teknologi informasi yang optimal dibutuhkan analisis kebutuhan sistem informasi menjadi langkah kritis yang perlu dilakukan. Pasalnya *output* dari penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* penting sebagai transparansi digital pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* (Zapata *et al.*, 2017).

Analisa kebutuhan pada penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* berdasarkan pernyataan Kepala Bagian Anggaran sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang berbunyi SIPD berdasarkan dalam pasal 4 bahwa SIPD diciptakan dan dikeluarkan untuk memberikan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terkoneksi dan terintegrasi dengan elektronik. Sebagaimana berlaku di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, yang dikelola oleh masing-masing pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan, dibantu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### 1.4 Tujuan Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang terdapat pada aplikasi SIPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun, 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah menyediakan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik serta dapat diakses dari satu situs resmi Kementerian Dalam Negeri, hal ini untuk mewujudkan satu data informasi yang sebagai wujud kesetaraan informasi kebijakan tata kelola data pemerintahan dalam menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan digunakan antar Instansi Pusat serta Instansi Daerah (Perpres No. 39 tahun 2019).

Tujuan dari *e-Planning* dan *e-Budgeting* sejalan dengan analisa kebutuhan penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada BPKAD Kabupaten Jember dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang menyediakan layanan informasi pemerintah daerah dan saling terhubung serta terintegrasi secara elektronik sehingga dapat diakses dari satu situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mewujudkan program Satu Data Informasi yang di sampaikan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

## **2. Program Planning**

### **2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jember**

Susunan organisasi adalah suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja atau orang-orang yang mewujudkan wewenang, jabatan dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerja sama dengan baik, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember yaitu berbentuk organisasi garis. Pelaksanaan perintah pengorganisasian dilakukan secara vertikal atau atas ke bawah berbanding lurus.

### **2.2 Kesiapan Kemampuan Kepala Bagian Anggaran dalam Menggunakan layanan *e-Planning* dan *e-Budgeting***

Kepala Bagian Anggaran selaku Sumber Daya Manusia untuk menerapkan *e-Planning* dan *e-Budgeting* sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab dalam proses penganggaran yang sudah terintegrasi elektronik dan Kepala Bagian Anggaran memimpin bagian anggaran serta memeriksa kembali perencanaan yang sudah terintegrasi elektronik dalam mengelola penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran untuk kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas. Sehingga, kesiapan Kepala Bagian Anggaran terkait dengan penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* sangat penting untuk proses perencanaan dan penganggaran yang akan dirumuskan.

Kemampuan yang dimiliki oleh Kepala Bagian Anggaran selaku PPTK dalam menerapkan *e-Planning* dan *e-Budgeting* telah didapatkan melalui sosialisasi dan tutorial video mengoperasikan aplikasi SIPD, hal ini dapat dinilai telah sesuai dengan asas *good governance*, karena dari adanya tutorial video dan sosialisasi dapat memahami dan meningkatkan kemampuan Bagian Anggaran dalam melaksanakan *e-Planning* dan *e-Budgeting* secara efektif, namun terlepas dari hal tersebut, terdapat harapan-harapan Kepala Bagian Anggaran untuk diadakannya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pelatihannya tidak hanya melalui tutorial video. Berdasarkan wawancara, peralihan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA ke Aplikasi SIPD dirasa cukup sulit bagi pengguna SIPD, sehingga perlunya adaptasi terhadap aplikasi SIPD.

### **2.3 Kesiapan Kemampuan Sub Bidang Anggaran Belanja dalam Menggunakan layanan *e-Planning* dan *e-Budgeting***

Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember dalam proses Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja

daerah. Sehingga, kesiapan pegawai Sub Bidang Anggaran terkait dengan penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* sangat penting untuk proses perencanaan dan penganggaran belanja. kemampuan yang harus dimiliki oleh Sub Bidang Anggaran dan Belanja, akan membantu Kepala Bagian Anggaran dalam menerapkan *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang telah didapatkan melalui sosialisasi dan tutorial video untuk mengoperasikan aplikasi SIPD, hal ini dinilai telah sesuai dengan asas *good governance*, namun terdapat harapan-harapan Kepala Bagian Anggaran untuk diadakannya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pelatihannya tidak hanya melalui tutorial video. Berdasarkan wawancara, peralihan aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA ke Aplikasi SIPD cukup sulit bagi pengguna SIPD, sehingga perlunya adaptasi terhadap aplikasi SIPD.

#### 2.4 Kesiapan Sarana dan Prasarana yang menunjang terselenggaranya *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan komponen penting dari aparatur negara, yang mengharuskan pegawai negara dan pegawai negeri untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang terkelola dengan baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan *e-Planning* dan *e-Budgeting* guna ketercapaian tujuan program (Setiabudhi, 2019). Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang terdapat pada Aplikasi SIPD ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan dasar hukum Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah untuk mendorong keberhasilan perencanaan dan penganggaran sehingga tercapainya tujuan dari *e-Planning* dan *e-Budgeting*.

### 3. Program Implementation

#### 3.1. Sosialisasi Fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Sosialisasi adalah proses pengenalan sistem yang akan digunakan dalam mengoperasikan *e-Planning* dan *e-Budgeting*. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang dimaksudkan tidak akan tercapai. Tujuan dari sosialisasi untuk menyebarkan informasi, meningkatkan pemahaman, dan memotivasi pihak-pihak yang berkepentingan agar mendukung dan berpartisipasi dalam suatu program (Adila & Dahtiah, 2020).

Sosialisasi yang diberikan dalam kaitannya penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* telah dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan video tutorial dalam melaksanakan *e-Planning* dan *e-Budgeting*. Sosialisasi dan video tutorial yang didapatkan oleh BPKAD Kabupaten Jember dilaksanakan secara daring (*online*), belum dilaksanakan sosialisasi secara langsung dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Kepala Bagian Anggaran selaku PPTK yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD berharap adanya pelatihan secara langsung dan dilakukan secara *offline*, dengan melihat aplikasi yang digunakan masih dikategorikan baru dioperasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.



### 3.2. Sosialisasi perangkat keras komputer yang dibutuhkan dalam *e-Planning* dan *e-Budgeting* bagi pengelola

Pada penelitian ini, *hardware* komputer yang digunakan dalam kaitannya mengoperasikan sistem elektronik harus berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari kapabilitas yang dimiliki memenuhi aspek yang terkoneksi dan harmonisasi sistem yang digunakan, mendapat sertifikat kelengkapan dari Menteri, mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan pelayanan penyedia, memiliki rekomendasi pendukung dari pemakai lainnya bahwa *hardware* tersebut dapat berfungsi sesuai spesifikasi, memiliki garansi persediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun, memiliki informasi kejelasan tentang keterbaruan, dan memiliki garansi dari bebas cacat produk.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Bagian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember pada proses pengenalan kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam proses *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang terdapat pada aplikasi SIPD kepada pengguna/operator tersebut telah lengkap dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

## 4. *Program Improvement*

### 4.1 Pengoperasian *e-Planning* dan *e-Budgeting* Bagi Pengguna

Kinerja pengoperasian sistem *e-Planning* dan *e-Budgeting* akan mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Menurut hasil observasi, kinerja pelaksanaan sudah optimal dalam perannya dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebelum melakukan terjun langsung pengoperasian aplikasi SIPD dan penggunaan fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting*, pemerintah pusat telah memberikan sosialisasi dan video tutorial terkait penggunaan aplikasi SIPD.

Keberhasilan yang tercapai dalam mengoperasikan *e-Planning* dan *e-Budgeting* sangat menentukan kualitas sistem yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran sehingga mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengoperasian *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada kantor BPKAD Kabupaten Jember dapat dilihat bahwa berdasarkan observasi dan wawancara telah berjalan sesuai dengan harapan Kepala Bagian Anggaran, dan pelaksanaannya berjalan lancar sehingga dapat mencapai keberhasilan dari proses *e-Planning* dan *e-Budgeting* (Retnowati, 2012).

### 4.2 Proses Instalasi dan setting Perangkat Keras yang Dibutuhkan *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Pengoperasian fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada Aplikasi SIPD berfungsi dalam proses menghasilkan informasi perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat untuk menampilkan data dan informasi secara transparan, hal ini menghubungkan atau mengintegrasikan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Peran SIPD dalam menyediakan informasi yang transparan perlu didukung dengan fasilitas fisik seperti infrastruktur dan peralatan yang merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi SIPD

pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Fitur fisik yang dimaksud dalam proses mengoperasikan *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD merupakan proses instalasi dan setting perangkat keras mulai dari CPU, Monitor dan Keyboard dapat terpasang dengan benar sehingga siap digunakan dan dioperasikan oleh pengguna/ operator *e-Planning* dan *e-Budgeting* serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

#### 4.3 Proses Instalasi dan Setting Perangkat Lunak yang Dibutuhkan *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Berdasarkan observasi yang dilakukan proses instalasi fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang ada pada Aplikasi SIPD menggunakan aplikasi berbasis website. Aplikasi berbasis web yaitu jenis aplikasi yang kegiatannya dikembangkan secara khusus agar dapat beroperasi melalui *web browser*. Hal ini untuk menjalankan aplikasi SIPD dapat melalui media *browser* seperti Chrome, Internet Explorer atau media lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan aplikasi ini. Pengguna/ operator dapat mengakses fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD ini melalui laman URL yaitu <https://sipd.kemendagri.go.id>. Maka, proses mengoperasikan fitur *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD beroperasi melalui peramban dan memerlukan koneksi internet yang stabil tanpa memerlukan instalasi tambahan. Sehingga penggunaan aplikasi dapat mudah digunakan oleh operator/pengguna secara optimal dan pengguna dapat cepat memahami cara kerja pada aplikasi SIPD.

Proses *setting* perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan *e-Planning* dan *e-Budgeting* merupakan *software* yang sudah terpasang pada komputer operator/ pengguna aplikasi SIPD yaitu Sistem Operasi (OS) berbentuk *windows*, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak beserta para pengguna yang bekerja dalam proses yang berurutan dan saling mendukung dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi berupa produk *output* (Nataniel and Hatta, 2009).

## 5. Program Certification

### 5.1 Efektivitas Program *e-Planning* dan *e-Budgeting*

Efektivitas Program *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Efektivitas Program *e-Planning* dan *e-Budgeting* diukur melalui lima indikator efektivitas program yang dikembangkan oleh Edy (2010), yaitu kepahaman suatu program, tepat sasaran, tepat waktu, ketercapaian tujuan dan adanya perubahan nyata.

Edy (2010) menjelaskan bahwa indikator pemahaman program merupakan suatu bentuk realisasi program sehingga program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pemahaman program ini diperlukan oleh pengguna program agar program dapat berjalan dengan baik. Pemahaman program *e-Planning* dan *e-Budgeting* dalam aplikasi SIPD adalah bagaimana pengguna/ operator program *e-Planning* dan *e-Budgeting* dapat memahami penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Kepala Bagian Anggaran, bentuk kephahaman program dicapai melalui tutorial dan sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan baik melalui media cetak serta media *online* panduan penggunaan SIPD.

Edy (2010) mengenai indikator ketepatan sasaran program yaitu sasaran yang dituju harus sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan, agar program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan dengan pelaksanaan program *e-Planning* dan *e-Budgeting*, indikator ketepatan sasaran program *e-Planning* dan *e-Budgeting* dinilai sudah baik. Mengenai ketepatan sasaran program *e-Planning* dan *e-Budgeting* yang ada pada aplikasi SIPD pada BPKAD Kabupaten Jember dikatakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, Program SIPD telah berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan dengan meningkatkan efisiensi urusan pemerintahan daerah, mendorong transparansi dalam kegiatan mereka, dan meningkatkan manajemen waktu.

Menurut Edy (2010) indikator ketepatan waktu digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program, dimana suatu program dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, apabila semakin cepat dan tepat penyelesaiannya dari tenggat waktu maka dapat dikatakan suatu program tersebut semakin efektif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa indikator ketepatan waktu dalam program *e-Planning* dan *e-Budgeting* dinilai sudah efektif. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah direncanakan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal. Namun, penting untuk diketahui bahwa tantangan yang tidak terduga mungkin muncul selama implementasi, yang berpotensi mengakibatkan sedikit penundaan terhadap jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* memiliki keterkaitan yang saling bersinergi, sehingga perlu adanya pengendalian dalam pelaksanaannya, karena saling berkaitan jika ada masalah pada salah satu bagiannya itu akan mempengaruhi bagian lainnya, maka Kepala Bagian Anggaran serta Kepala Sub Bidang Anggaran dan Belanja sebagai PPTK memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD di bagian anggaran.

Indikator ketercapaian program merupakan suatu keberhasilan tujuan atau arah yang ingin dicapai di dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan program. Tercapainya suatu tujuan dalam kaitannya efektivitas program menurut Edy (2010) yakni jika suatu program memberikan manfaat maka semakin efektif pula program yang digunakan tersebut. Begitupula dalam pelaksanaan program *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ini yang menginginkan informasi pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparan dan inovatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, serta pemantauannya dapat dilakukan dari satu aplikasi saja. Pelaksanaan program *e-Planning* dan *e-Budgeting* pada aplikasi SIPD yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 2 menginginkan penyediaan layanan informasi pemerintah daerah dan saling terkoneksi dari satu situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan dan penganggaran memiliki suatu koneksi yang saling berhubungan, sehingga tetap adanya pengendalian dalam pelaksanaannya, karena saling berkaitan sehingga jika ada masalah pada salah satu bagiannya itu akan mempengaruhi bagian yang lainnya.

Indikator perubahan nyata menurut Edy (2010) yaitu jika suatu program dikatakan efektif, apabila program tersebut dapat memberikan perubahan nyata yang akan dirasakan langsung berdasarkan sasaran program tersebut. Berdasarkan hal ini,

suatu program akan mampu membuat suatu kemajuan, inovasi baru atau adanya sesuatu yang terlihat perubahan di sebelumnya. Suatu program dikatakan berhasil dan sukses mencapai tujuannya jika terdapat perubahan yang nyata pada program tersebut, jika tidak ada perubahan atau peningkatan yang dipersepsikan dari program tersebut, maka bisa diartikan bahwa implementasi dari program belum berhasil atau belum mampu mencapai objektif tertentu.

Adanya aplikasi SIPD ini terdapat suatu perubahan yang dirasakan saat menggunakan SIMDA. SIPD dinilai lebih meringkas kegiatan dari menggunakan SIMDA, seperti proses perencanaan, penganggaran sampai pada penatausahaan, namun saat ini telah dilakukan kegiatan tersebut menggunakan satu aplikasi SIPD dan memuat kegiatan dari kegiatan perencanaan sampai pelaporan tersedia, Pada aplikasi SIPD akun belanja telah berubah tidak lagi menggunakan istilah belanja langsung dan tidak langsung, melainkan di aplikasi SIPD saat ini yang ada seperti belanja pegawai, barang dan jasa dan lainnya, manfaat lainnya yaitu dapat lebih mudah pengawasan dalam kegiatannya karena langsung terhubung ke pusat, sehingga lebih transparan dan lebih professional serta efektif.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting* menggunakan model *Center for The Study of Evaluation-University of California in Los Angeles* (CSE-UCLA) dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penilaian komponen evaluasi CSE-UCLA, yaitu:

No.	Komponen Evaluasi	Keterangan
1.	<i>System Assessment</i>	Optimal
2.	<i>Program Planning</i>	Optimal
3.	<i>Program Implementation</i>	Optimal
4.	<i>Program Improvement</i>	Optimal
5.	<i>Program Certification</i>	Optimal

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, R. N., & Dahtiah, N. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem E-Budgeting dengan Pendekatan Human Organization Technology Fit Model pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Industrial Research Workshop and National Seminar, 2015*, 847–853.
- Asiah, Nur. (2020). Perangkat keras komputer <https://doi.org/10.31219/osf.io/dg2s9>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (S. Saat (Ed.)). Erlangga.
- Bryson, J.M. and Einsweiler, R. C. (1988). *Strategic Planning: Threat and Opportunities for Planners*. Planner Press.
- Bryson, J. M. (1988). *A strategic planning process for public and non-profit organizations*. *Long Range Planning*. 1(21), 73–81. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(88\)90061-1](https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90061-1)

- Dewi, N., Irfansyah, & Zakir, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Department of Food Crops, Horticult. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 887–894. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IKS>
- Divayana, D.G.H., & Sugiharni, G. A. (2016). Evaluasi Program Sertifikasi Komputer Pada Universitas Teknologi Indonesia Menggunakan Model CSE-UCLA. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5, 865–872.
- Divayana, D. G. H. (2015). Penggunaan Model CSE-UCLA dalam mengevaluasi Kualitas Program Aplikasi Sistem Pakar In SNATIA. *Ilmu Komputer Universitas Udayana*, 165–168.
- Divayana, D. G. H. (2017). Evaluasi Pemanfaatan E-Learning di Universitas Teknologi Indonesia Menggunakan Model CSE-UCLA. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(2), 280–289. <https://doi.org/10.21831/cp.v36i2.12853>
- Djunaedi Achmad. (1995). Perencanaan Strategis untuk Perkotaa; Belajar dari pengalaman Negara Lain. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 20–25.
- Edy, S. (2010). Budaya Organisasi. In *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* (Vol. 1, Issue 3). Kencana. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i3.716>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 60–87. [https://www.aifisdigilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03\\_isi\\_mugi\\_hartana\\_\(permah\).pdf](https://www.aifisdigilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03_isi_mugi_hartana_(permah).pdf)
- Hikmah, A. N., Candradewini, C., & Miradhia, D. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Sistem Knowledge Management Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Dki Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 291. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37701>
- KPK. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik*, 58. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>
- Libarkin, J. C., & Kurdziel, J. P. (2002). Research Methodologies in Science Education: The Qualitative-Quantitative Debate. *Journal of Geoscience Education*, 50(1), 78–86. <https://doi.org/10.1080/10899995.2002.12028053>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Maryam, S. N. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Moelong, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun. (2019). Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.* Jakarta
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 82 Tahun. (2012). *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.* Jakarta
- Perpres No 39 tahun 2019. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. *Peraturan Presiden, 004185, 1–35.* Jakarta  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. (n.d.). *Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.* Jakarta
- Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., A. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).* Mandar Maju.
- Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., A. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.*
- Quinn, P. M. (1980). *Qualitative Evaluation Methods.* Sage Publications Ltd.
- Rachmat, H. B., & Andika. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Budgeting di Kelurahan Kebonkosong Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Transformasi Pemerintahan, 8(2), 70–93.* <https://media.neliti.com/media/publications/267532-none-aa5a1a3b.pdf>
- Rafiqi, I., Selviyanti, N. H., Halimah, S., & Eka, N. (2020). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). *Journal Of Islamic Economic Business, 1(2), 1–24.*
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif, 17(1), 54.* <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences, 1(1), 7.* <https://doi.org/10.35801/tss.2019.1.1.25014>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* CV. Alfabeta.
- Sukmadinata Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan.* PT Remaja Rosadakarya.
- Trimbawan, P., Iqbal, K. M., Agustina, M. S., Suherli, M., & Adrianto, R. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Pada Bappeda Litbang Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 4(2), 87–96.* <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.84>
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 (p. 90). (n.d.). Jakarta
- Yessi Hayati. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Melalui Aplikasi E-Planning Di Kantor Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Niara, 15(1), 166–173.* <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7391>
- Zapata, F., Heeks, R., Nam, T., Ministry, F. M., Soegiono, A. N., Yim, J. S., Moses, P., Azalea, A., Koznov, D., Andreeva, O., Nikula, U., Maglyas, A., Muromtsev, D., Radchenko, I., Toledo-Pereyra, L. H., Vita Elysia Sumartono, A. W., Sandoval-Almazan, R., Styryn, E., Gutierrez, J., ... Siswanto, A. (2017). Open Government:

*Implementasi Model Center for The Study of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA): Dalam Mengevaluasi Program e-Planning dan e-Budgeting*

Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia (Sebuah Laporan untuk Advokasi Kebijakan Implementasi e-Government ). *Government Information Quarterly*, 46(1), 715-724.  
<http://ictupdate.cta.int/>  
<http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/view/953/909>  
<http://repository.ut.ac.id/7083/1/UTFMIPA2017-14-vita.pdf>  
[http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6442:economic-report-2015-2016](http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=6442:economic-report-2015-2016).